Bali Post

Bansos Dipangkas untuk Beli Mobdin

Dikhawatirkan Ganggu Program Pembangunan di Desa

Singaraja (Bali Post) -

Rencana dewan Buleleng membeli mobil dinas (mobdin) dengan membagi jatah bantuan sosial (bansos) dikhawatirkan akan mengganggu program pembangunan di desa. Kucuran bansos ini sangat diharapkan untuk kepentingan masyarakat luas. Karena itu, rencana ini diharapkan dikaji detail dan matang. Jika kebutuhan mobdin bisa dinomorduakan, maka rencana itu ada baiknya ditunda untuk beberapa tahun ke depan.

Demikian diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Desa (Forkomdes) Kabupaten Buleleng I Made Suteja, Minggu (25/10) kemarin.

Lebih jauh, pria yang menjabat Perbekel Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, ini mengatakan, kalau pembelian mobdin dewan baru wacana, perlu dilakukan pembahasan secara detail. Bahkan, jika perlu dilakukan survei dengan penyebaran kuisioner di masyarakat untuk mencari masukan terhadap rencana tersebut. Jika wacana dewan itu dari segi regulasi yang mengatur memang ada, maka pihaknya tidak bisa berkata banyak dan mau tidak mau harus menerima program dewan tersebut. Namun demikian, aturan ini perlu dipelajari kembali. Hal ini karena pemanfaatan dana bansos didasari oleh aturan. Jangan sampai aturan pemanfatannya melenceng dari regulasi, sehingga dikhwatirkan akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. "Kalau menurut saya, lihat dulu aturan soal pembelian mobil dinas dengan memangkas bansos wakil rakyat terhormat. Kalau itu ada regulasi, kita tidak bisa berkata banyak. Tapi kalau tidak ada aturan kita harapkan rencana itu ditunda untuk sementara," katanya.

Menurut Suteja, selama ini dana bansos dari dewan penyerapannya sudah cukup baik untuk menunjang pembangunan di desa. Selama ini lebih banyak bansos wakil rakyat untuk pembangunan yang tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Meski demikian, masyarakat sudah sangat merasakan dampak positif bansos tersebut. Untuk itu, tahun depan pihaknya berharap agar bansos bisa mengalir utuh tanpa harus dipangkas untuk membeli mobdin. Jika bansos sekarang harus dialihkan sebagian untuk beli mobdin dikhawatirkan program pembangunan di desa itu akan terganggu.

Selain itu, ke depan pihaknya sangat setuju dengan rencana pemerintah kabupaten yang mengatur dana bansos agar bisa membiayai program pembangunan yang ditetapkan pada RPJMDes. **(kmb38)**

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015
Hal : 9

Bali Post

Dewan Sayangkan Pembangunan Akses Jalan Dermaga Batal

Semarapura (Bali Post) –

Pernyataan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta yang mengatakan pembuatan akses jalan Dermaga Gunaksa tidak dapat dilaksanakan pada 2015, mengundang reaksi sejumlah kalangan. Salah satunya anggota DPRD Klungkung Wayan Mastra.

Politisi asal Desa Tangkas itu menyayangkan pembangunan akses jalan dermaga tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Apalagi, batalnya pembangunan akses jalan disebabkan belum normalnya alur Tukad Unda di sekitar dermaga. "Kami sangat sayangkan kenapa bisa pembangunan akses jalan dermaga tidak bisa dilaksanakan gara-gara belum dinormalisasikannya alur Tukad Unda," ujar Mastra, Minggu (25/10) kemarin.

Ia juga tidak habis pikir kenapa hal tersebut baru diungkapkan sekarang. Padahal, dalam rapat kerja dengan DPRD, tidak ada dari Dishub dan Infokom Klungkung yang menyinggung soal batalnya pembangunan akses jalan dermaga akibat belum adanya normalisasi alur Tukad Unda. Dishub hanya membahas akses jalan dan pembangunan dermaga. Dishub menarget pembangunan akses jalan dermaga selesai 2016, sedangkan dermaga tuntas akhir 2015. "Kalau Dishub tidak bisa merealissikannya, saya akan demo. Hal ini saya tekankan dalam rapat kerja," katanya.

Mastra menilai lobi-lobi yang dilakukan pemkab ke pusat agak kurang, sehingga pembangunan akses jalan tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Padahal Kementerian Perhubungan RI sudah memasang anggaran sekitar Rp 40 miliar dalam APBDN Induk 2015. Dengan adanya persoalan ini, Mastra berencana mengundang Bupati Suwirta untuk menjelaskan informasi tersebut dalam rapat kerja. "Karena kami di DPRD belum mengetahui informasi tersebut," kilahnya.

Sebelumnya, Bupati Suwirta mengungkapkan pembuatan akses jalan dermaga tidak dapat dilaksanakan tahun ini dengan alasan belum dilakukannya normalisasi Tukad Unda. Jika tetap dibuat, dikhawatirkan aliran air akan merusak akses jalan menuju dermaga. Ini dikatakannya bupati setelah melakukan pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono.

Suwirta juga mengatakan jika dermaga telah beroperasi akhir 2015 atau awal 2016, untuk sementara akan digunakan jalan eksisting yang ada sekarang. Agar bisa dilalui kendaraan, akan diupayakan dengan menutup beberapa lubang dan memasang pipa pada aliran air.

Sementara itu, untuk mempercepat proses normalisasi aliran Tukad Unda, Pemkab Klungkung telah melakukan langkah pendataan atau inventarisasi kepemilikan lahan di eks galian C. Langkah ini untuk mengetahui apakah lahan itu milik pribadi atau tanah negara. **(kmb)**

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015
Hal : 12

Bali Post

Kelebihan Anggaran Rp 37 Miliar

Eksekutif Jadi Bulan-bulanan Dewan

Mangupura (Bali Post) –

Kelebihan anggaran mencapai Rp 37 miliar, terus menjadi bulan-bulanan wakil rakyat di DPRD Badung. Selain kesal karena hibah tak cair, sorotan Dewan itu lantaran kelebihan anggaran tidak melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Bahkan, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Badung I Nyoman Sentana mengingatkan eksekutif untuk mempelajari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebelum nyolonong melakukan anggaran tambahan.

"Landasan hukum mana yang memberikan ruang pada dana siluman itu. Seyogianya eksekutif belajar UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," kata Sentana yang juga Sekretaris DPC Gerindra Badung ini, Minggu (25/10) kemarin.

Dikatakannya, munculnya dana tambahan belanja di antaranya pengadaan mobil tangga senilai Rp 14 miliar dan pengadaan baju endek Rp 3,8 miliar setelah KUA-PPAS disepakati oleh Dewan. "Anggaran yang nyelonong setelah pembahasan KUA-PPAS 2016 kan bukan dana kebencanaan yang tidak pernah bisa diprediksi kapan datangnya," katanya.

Menurutnya, anggaran untuk pengadaan barang harusnya terencana dan terprogram dengan baik. Sebab, anggaran ini bukan untuk dana kedaruratan bencana alam. Anggota Komisi IV ini juga menilai dana siluman tersebut dipaksakan dalam APBD.

"Saya bersama Fraksi Gerindra tidak akan bersedia menandatangai APBD tahun 2016. Kalau sampai lolos, Fraksi Gerindra akan berada di luar, tidak ikut terlibat dalam penandatanganan APBD 2016," tegasnya.

Kabag Humas dan Protokol Setda Badung A.A. Gede Raka Yuda saat dimintai konfirmasi mengatakan, sejatinya semua telah memlalui proses sesuai dengan mekanisme. "Intinya, tidak ada masalah lagi. Semua sudah sesuai dengan proses dan persetujuan Dewan," katanya. **(kmb27)**

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015

Hal : 3

Bali Post

Pencairan Dana Bansos Ngadat

Anggota DPRD Kelimpungan

Semarapura (Bali Post) –

Ngadatnya pencairan dana hibah dan bansos pada APBD Perubahan 2015 membuat sebagian anggota DPRD Klungkung kelimpungan. Pasalnya, tidak sedikit anggota Dewan yang telah berjanji dan menalangi terlebih dahulu dana hibah dan bansos yang diberikan ke masyarakat.

Untuk menindaklanjuti persoalan ini, pihak DPRD Klungkung berencana mengundang Bupati Nyoman Suwirta dalam rapat kerja untuk membahas pencairan dana hibah dan bansos, Senin (26/10) ini. "Surat untuk membahas pencairan dana hibah dan bansos ini sudah dilayangkan ke bupati," kata Komang Gede Ludra, salah satu anggota DPRD, Minggu (25/10) kemarin.

Menurut Ludra, rapat kerja dengan bupati sangat penting dilakukan. DPRD Klungkung sempat membahas persoalan tersebut dengan eksekutif pada Selasa (20/10) lalu. Namun, saat itu rapat kerja membahas pencairan dana hibah dan bansos hanya dihadiri Sekda Gede Putu Winastra dan Kabag Kesra Wayan Winata, sehingga sejumlah anggota Dewan tidak puas. Apalagi tidak ada kepastian soal pencairan dana hibah dan bansos. "Karena hal ini menyangkut kebijakan bupati, maka Pak Bupati kami undang dalam rapat kerja," ujarnya.

Selain itu, ada informasi di DPRD kalau bupati bisa mencairkan dana hibah dan bansos ke masyarakat. Di satu sisi, kalangan Dewan juga tidak melihat bupati membuat antisipasi agar dana hibah dan bansos dapat dicairkan. Seperti halnya yang dilakukan Gubernur Bali dengan membuat rancangan pergub yang sudah disetor ke Mendagri. "Seharusnya hal seperti ini juga dilakukan oleh bupati, tapi Dewan tidak melihatnya," kilahnya.

Informasi lainnya, dana hibah dan bansos yang tidak bisa dicairkan tidak dimasukkan ke silpa. Dana tersebut justru masuk ke dana bantuan tidak terduga. Hal ini juga menjadi pertanyaaan sebagian anggota DPRD. Apalagi hal itu dilakukan tanpa melalui persetujuan Dewan. Untuk meluruskan informasi tersebut, maka DPRD perlu mengundang bupati untuk melakukan rapat kerja terkait pencairan dana hibah dan bansos.

Bupati Klungkung mengakui diundang DPRD untuk membahas pencairan dana hibah dan bansos hari ini. Hanya, bupati tidak bisa menghadiri karena harus memenuhi undangan ke Makassar. Ia telah menunjuk Sekda Gede Putu Winastra untuk mewakilinya ke DPRD. "Coba langsung hubungi sekda ya, apalagi hal ini menyangkut masalah teknis," tegas Suwirta. **(kmb)**

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015
Hal : 12

Bali Post

Revisi Perda RTRWP Bali

Ada Indikasi Wadahi Kepentingan Reklamasi

Denpasar (Bali Post) -

Keputusan DPRD Bali untuk segera merevisi Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali sejatinya bukan agenda baru. Niat merevisi bahkan sudah terendus sejak 2010. Tiga agenda besar disebut-sebut menjadi alasan di baliknya. Di antaranya, keinginan untuk mempertinggi bangunan di Bali lebih dari 15 meter, memperpendek jarak sempadan pantai, dan menghilangkan radius kesucian pura. "Nah, sekarang ketemu satu celah lagi yang namanya Perpres No. 51 Tahun 2014. Mereka tidak mau peduli apakah Perpres 51 itu proses terbitnya benar atau tidak. Mereka juga tak peduli apakah perpres itu bertentangan dengan Riparda atau tidak. Dugaan saya, mereka menggunakan celah ini untuk memuluskan agenda atau melegitimasi hukum agenda reklamasi Teluk Benoa selain tiga agenda besar itu," ujar aktivis lingkungan Wayan "Gendo" Suardana, Minggu (25/10) kemarin.

Kata dia, revisi Perda RTRWP tidak lebih hanya untuk mengakomodasi kepentingan investor. "Yang paling berkepentingan dengan tinggi bangunan kan investor, investasi. Begitu juga yang berkepentingan dengan jarak sempadan pantai dan radius kesucian pura. Apakah masyarakat Bali yang membutuhkan? Enggak. Masyarakat Bali paling banter tinggi bangunannya sepuluh meter," jelasnya.

Gendo menambahkan, Perda RTRWP Bali sejak dulu tidak digunakan untuk penataan ruang, melainkan penataan uang. Lucunya lagi, hampir tidak pernah ada implementasi dan penegakan perda sejak diterbitkan 2009. Tetapi kemudian tiba-tiba ada keinginan merevisi.

Anggota Dewan Daerah Walhi Bali ini juga menyesalkan kenapa setiap ada usulan pembangunan seperti misalnya jalan tol dari Bali Selatan ke utara atau kereta api, mesti diakomodir dengan revisi perda. "Kalau setiap pembangunan diakomodir lalu diubah Perda RTRW-nya, kapan Perda RTRW-nya menjadi satu dokumen yang punya kepastian hukum. Makanya, prinsipnya kan begini, Perda RTRW itu berlaku 20 tahun makanya Perda 16 ini tentang RTRW dari 2009 sampai 2029. Boleh dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Tetapi pertanyaannya, urgensi evaluasinya apa?" imbuhnya.

Gendo menjelaskan, bila memakai alasan Perpres 51 sebetulnya tidak tepat. Begitu juga bila dikaitkan dengan keberadaan jalan tol Bali Mandara yang disebut masih melanggar Perda RTRWP. Pasalnya, jalan tol sudah memiliki kekuatan hukum lewat terbitnya Perpres No.45 Tahun 2011 sehingga tidak bisa disebut melanggar lagi.

Hal. 19

Lima Tahun

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015

Hal : 1

Bali Post

Sambungan - - -

Lima Tahun

Dari Hal. 1

Sementara itu, praktisi pariwisata Drs. Ec. I Putu Anom, M.Par. mengatakan, revisi Perda RTRWP setelah berjalan lima tahun memang dibolehkan dari segi aturan. Namun, Ranperda APZ (Arahan Peraturan Zonasi) yang disetujui sebagai perda turunan dari Perda RTRWP justru mengacu pada Perpres No.51 Tahun 2014. Seperti diketahui, perpres ini memuat kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan. "Hal ini tentu ada indikasi untuk memuluskan reklamasi atau revitalisasi Teluk Benoa. Padahal Perpres 51 tersebut masih mendapat sorotan tajam dan bahkan besar keinginan tokoh-tokoh dari berbagai elemen baik akademisi dari berbagai disiplin ilmu, agamawan, para mantan pejabat negeri, BUMN, swasta asal Bali, LSM, Himpunan Mahasiswa Hindu dan masyarakat Bali dari kalangan bawah sampai atas agar Presiden Jokowi mencabut perpres tersebut dan reklamasi atau revitalisasi Teluk Benoa bisa dibatalkan," paparnya.

Mantan Dekan Fakultas Pariwisata Unud ini menambahkan, kajian Unud sudah jelas menghasilkan bahwa reklamasi Teluk Benoa tidak layak. Kajian ini semestinya dicermati bersama, dan DPRD sebaiknya tidak terburu-buru mengesahkan Ranperda APZ dan ingin merevisi Perda RTRWP.

"Seharusnya Pansus Ranperda APZ menyosialisasikan dulu ke masyarakat dan ada uji publik terutama ke perguruan tinggi yang ada di Bali. Daerah Bali adalah milik semua masyarakat Bali, bukan hanya milik kelompok tertentu," tegasnya. **(kmb32)**

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015

Hal : 19

Bali Post

Tokoh Pemuteran Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Singaraja (Bali Post) -

Pencabutan Perpres No. 51 Tahun 2014, terkait rencana mengurukan Teluk Benoa mendapatkan penolakan tokoh masyarakat Desa Pemuteran, Gerokgak, I Wayan Siram (63). Dikatakan, rencana reklamasi Teluk Benoa tidak perlu dilakukan. Pemerintah Bali diminta mengambil sikap tegas, terlebih lagi banyak komponen masyarakat dari Walhi Bali, LSM Lingkungan lainnya bersama-sama menyuarakan penolakan. Penolakan itu bahkan didengungkan sejak awal rencana pengurukan di kawasan konservasi Teluk Benoa itu.

Wayan Siram sebagai pelaku lingkungan di pesisir laut Desa Pemuteran merasa terusik. Pulau Bali diciptakan Yang Maha Pencipta dengan bentuk cantik. Itu menjadi warisan generasi Bali. Rencana reklamasi yang merubah wajah/peta pulau Bali itu sudah pasti membuat pulau ini tak cantik lagi. Karena itu, reklamasi yang penuh nuansa artificial itu sungguh tidak diperlukan. Sebab dari segala segi kecenderungannya, reklamasi itu sangat merusak. Terlebih keberadaan Teluk Benoa itu disakralkan umat Hindu. "Selama ini Buleleng masih diam. Warga belum banyak berbicara terkait isu reklamasi di Teluk Benoa itu. Saya ingin mengajak masyarakat Buleleng ikut menolak rencana reklamasi Teluk Benoa itu. Ini, karena akan berdampak secara tidak langsung terhadap kelangsungan alam Bali ke depannya," ujar Siram, ditemui *Bali Post* di Desa Pemuteran, Minggu (25/10) kemarin.

Siram yang tinggal dan besar di Pemuteran merasakan begitu pentingnya kawasan pesisir bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali. Mendengar Teluk Benoa mau direklamasi, ia yang sejak kecil berkecimpung di dunia pariwisata ini berharap alam Bali yang telah lestari tidak perlu diusik. Ia mencontohkan di Buleleng, alamnya lestari dan alami seperti, terumbu karang di bawah laut Pemuteran, Pulau Menjangan, hingga Taman Nasional Bali Barat (TNBB). "Saya mendengar dari berita koran dan media massa. Saya merasa peduli terhadap kawasan Bali Selatan. Walaupun kita berada di Bali Utara. Pulau Bali sudah diciptakan dengan bentuk cantik. Jangan sampai yang di atas murka terhadap Bali. Akibat manusia dengan kemampuan terbatas malah nekat merubah perwajahan pulau Bali. Jelas itu siapa nanti yang akan bertanggung jawab jika terjadi musibah," ucapnya berang. **(kmb34)**

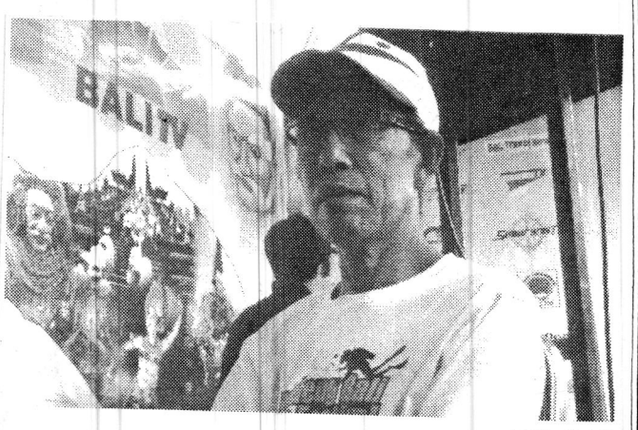

Bali Post/kmb34

REKLAMASI TELUK BENOA - *Tokoh masyarakat Desa Pemuteran I Wayan Siram angkat bicara soal reklamasi Teluk Benoa. Ia merasa proyek pengurukan laut tidak perlu dilakukan. Reklamasi itu justru merusak pariwisata dan alam Bali.*

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015

Hal : 13